

**KECENDERONGAN PERILAKU PEMILIH DI PROVINSI BENGKULU
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014**
*(Studi Komparasi pada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan
Kabupaten Bengkulu Utara)*

OLEH :
Angky Galaty¹
Aries Munandar²

ABSTRACT
**Kecenderungan Perilaku Pemilih di Provinsi Bengkulu
Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014**
*(Studi Komparasi pada Masyarakat Kabupaten Kaur dengan
Kabupaten Bengkulu Utara)*

Pemilu merupakan bentuk demokratisasi di Indonesia yang menjadikannya sebagai salah satu elemen penting dalam menentukan arah kehidupan bernegara. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat tiga komponen utama yang menjadi dasar utama, yaitu kontestan pemilu, pemilih pemilu dan penyelenggara pemilu. Melihat komponen yang terlibat, pemilu tidak hanya menjadi ajang kontestasi bagi peserta pemilu dalam mendapatkan jumlah suara terbanyak dari pemilih, namun juga menjadi wahana pendidikan politik yang terbuka dan *massive* yang mengajarkan masyarakat mengenai proses pendewasaan tentang hak dan kewajiban. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih perlu mendapat perhatian khusus yang dikarenakan bahwa pemilih merupakan komponen yang paling banyak memerlukan perhatian. Melihat begitu pentingnya pemilih sebagai pemberi suara dalam pemilu, maka perilaku pemilih menjadi permasalahan tersendiri yang harus diperhatikan. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, KPU Kabupaten Kaur dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara melakukan penelitian mengenai perilaku pemilih tersebut. Dimana yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan kepedulian pemilih, pengetahuan pemilih terhadap tujuan dan fungsi pemilu sebagai sarana demokratisasi, pemahaman masyarakat tentang fungsi partai politik dan fungsi anggota legislatif yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam parlemen, cara pemilih mencari dan mendapatkan informasi terkait calon legislatif yang akan dipilih, dan pengaruh orang-orang disekitar pemilih dalam mempengaruhi pilihannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan KPU Kabupaten Kaur melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion (FGD)*, Wawancara Mendalam, dan Telaah Dokumen. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat setempat, penyelenggara pemilu, pemilih dan peserta yang terlibat pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, diketahui bahwa di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kaur secara umum telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tujuan dan fungsi pemilu serta konsep mengenai penyelenggaraan pemilu yang ideal. Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur juga dipandang telah memahami konsep keterwakilan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Namun, yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa pada kedua kabupaten tersebut praktek "politik uang" menjadi suatu hal yang wajar dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun keduanya mengakui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan seminan dari pemilu ideal yang diharapkan. Pada akhirnya, dalam penelitian ini diperlukan telaah dan aksi sosiolegis untuk mendorong agar pelaksanaan pemilu berada konstruksi yang semstinya, sehingga perang penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sangat diharapkan untuk melakukan pembangunan *social awarness* dan pendidikan politik di masyarakat.

Kata kunci: *Pemilu, Pemilih dan Perilaku Pemilih.*

¹ Komisioner KPU Provinsi Bengkulu

² Komisioner KPU Provinsi Bengkulu

A. Pendahuluan

Perkembangan demokratisasi di Indonesia telah menempatkan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu elemen penting dalam mekanisme penyelenggaraan negara. Pemilu menjadi proses di mana semua warga secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui proses pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan keinginan, harapan dan kepentingan melalui pilihan-pilihan politiknya dan pada akhirnya menentukan arah kehidupan bernegara secara menyeluruh.

Secara konseptual, pemilu didefinisikan sebagai proses dan sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menentukan pilihannya atas alternatif-alternatif yang ada. Dalam sistem politik demokrasi modern, pemilu menjadi instrumen yang paling penting. Pemilu menjadi salah satu parameter utama untuk menilai berjalan tidaknya sistem demokratis di suatu negara. Pemilu juga menjadi wahana pendidikan politik yang terbuka dan *massive* yang mengajarkan masyarakat mengenai proses pendewasaan tentang hak dan kewajiban. Dengan pemilu masyarakat fungsi dan kedudukannya sebagai pemilih kedaulatan. Pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Dalam proses pemilu setidaknya melibatkan tiga komponen utama, yaitu : kontestan sebagai peserta, masyarakat sebagai pemilih, dan penyelenggara pemilu. Keberadaan penyelenggara pemilu termaktub dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Kontestan pemilu akan bervariasi bergantung dari jenis pemilu yang dilaksanakan. Pada pemilihan legislatif DPR dan DPRD kontestan terdiri dari partai politik. Pada pemilihan Anggota DPD, peserta pemilu adalah perorangan dari masing-masing provinsi dengan persyaratan sejumlah dukungan tertentu. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu adalah masing-masing pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Politik atau Koalisi Partai Politik.

Secara khusus, masyarakat sebagai pemilih perlu mendapat perhatian karena sesungguhnya dari komponen ini lah pelaksanaan pemilu menjadi diperlukan. Suara mayoritas masyarakat lah yang sesungguhnya ingin diketahui melalui pemilu. Berbagai indikator

keberhasilan pemilu juga merujuk pada peran masyarakat dan perilaku masyarakat sebagai pemilih di dalam pemilu, seperti tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS saat pemungutan suara, tingkat keabsahan suaranya, validitas data pemilih, dan sebagainya. Oleh karenanya menjadi suatu yang lumrah bila berbagai statistika dan survei lebih banyak diarahkan kepada kecenderungan perilaku pemilih. Dari pemilih dan oleh pemilih pula lah hasil pemilihan umum ditentukan.

Keterlibatan masyarakat sebagai pemilih didalam sebuah proses pemilu disimpulkan oleh Milbrath (1965 : 68) yang menyatakan bahwa seseorang akan merasa peka dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila telah mempunyai sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mengenai politik. Pemahaman politik yang cukup akan mendorong seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara independen menurut hatinya, karena ia menyadari bahwa pilihannya akan berpengaruh pada siapa yang akan berkuasa dan sekaligus juga menentukan nasib dan kehidupan mereka.

Di Indonesia, idealisme pemilu dikaitkan dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Idealisme ini berbenturan dengan kenyataan di lapangan dimana masih terdapat banyak praktik transaksional dan politik uang, manipulasi suara, politisasi birokrasi, pengerahan anggaran untuk pencitraan dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Realitas ini seolah mendapat tempat di masyarakat yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menganggap wajar pemberian uang atau materi dalam pemilu (LPSI dan Rakata Institute dalam Angraini, 2015).

Dalam rangka mengidentifikasi perilaku pemilih di wilayah Provinsi Bengkulu dalam pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melakukan penelitian di wilayahnya masing-masing. Kedua penelitian dimaksud sama-sama mengidentifikasi perilaku pemilih berkaitan dengan pemahaman mengenai pemilu, parpol, dan caleg; pemahaman mengenai keterwakilan politik; bagaimana informasi mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan politik, dan siapa saja yang

menjadi panutan warga dalam mengambil keputusan politik.

Mengingat desain dari kedua penelitian dimaksud memiliki kesamaan yang cukup signifikan, maka dalam tulisan ini akan **diperbandingkan** antara keduanya. Perbandingan ini selain dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada pada kedua daerah kabupaten tersebut, juga digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum tentang kecenderungan perilaku pemilih di wilayah Provinsi Bengkulu dalam cakupan yang lebih luas.

Oleh karena itu permasalahan penelitian diadopsi dari pertanyaan penelitian dari kedua riset dimaksud, yaitu :

1. Bagaimana keadaan kepedulian pemilih di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pemilu ?
2. Apakah pemilih di kedua daerah tersebut mengetahui tujuan dan fungsi pemilu sebagai sarana demokratisasi ?
3. Bagaimana keadaan pemahaman masyarakat di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Utara tentang fungsi partai politik dan fungsi anggota legislatif yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam parlemen di daerah ?
4. Bagaimana pemilih di masing-masing kabupaten tersebut mencari dan mendapatkan informasi terkait calon legislatif yang akan mereka pilih ?
5. Bagaimana orang-orang sekitar pemilih pada kedua daerah tersebut mempengaruhi pilihannya?

B. Tinjauan Pustaka

Oleh karena penelitian ini hanya membandingkan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur (2015) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara (2015) maka landasan teori yang digunakan sepenuhnya merujuk pada landasan teori yang digunakan oleh kedua penelitian tersebut.

Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik yang meliputi tanggapan internal dan tindakan nyata (Surbakti, 1992:131). Tindakan yang bersifat internal yaitu persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan; sementara serta tindakan-tindakan nyata berupa pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya.

Persepsi politik berkenaan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik

mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap politik merupakan hubungan antara keyakinan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor citra partai politik, citra kandidat dan isu politik (Nimmo dalam Eko Harry Susanto, 2009). Citra Partai Politik, mencakup antara lain, apa yang dipercaya rakyat, yang diharapkan dari partai politik, dan hubungan antara partai dengan kandidatnya. Citra Kandidat dan gaya personal seorang kandidat politik, para pemberi suara biasanya mencari petunjuk tentang peran politik kandidat terkait pengalaman, latar belakang dan potensi sebagai pejabat publik. Sementara itu isu politik yang dianggap penting dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan menjadi pertimbangan pemberi suara dalam pemilihan umum

Perilaku memilih adalah perilaku politik yang terbuka warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih. Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat suara. Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi sang pemilih, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan.

Teori *voting* dapat dikelompokkan dalam tiga mazhab besar. Pertama, mazhab sosiologis yang meyakini bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Mazhab psikologis mengasumsikan jika perilaku memilih individu ditentukan oleh

faktor psikis seseorang seperti identifikasi diri terhadap partai politik, kesukaan terhadap kualitas kepribadian kandidat, dan informasi politik. Inti dari mazhab ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.

Bila pendekatan sosiologis dan psikologis menempatkan individu sebagai obyek yang tidak dapat bertindak bebas karena ditentukan oleh struktur sosial dan aspek psikis atau disebutkan juga determinan, maka mazhab rasional menempatkan individu sebagai aspek yang bebas atau voluntary dalam menentukan pilihannya.

Anthony Downs melalui deskripsinya mengenai *homo economicus*, menyatakan bahwa sang pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau walaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Ini disebut juga dengan *self-interest axiom*. Manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harga benda mereka. Jika hal ini diterapkan kepada perilaku pemilih, maka ini berarti bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep politis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintah dibandingkan dengan partai lain.

Lebih lanjut *Down* menyatakan bahwa seorang pemilih umumnya tidak memiliki informasi yang baik dibidang politik oleh karena informasi yang diterima tidak seimbang, sehingga menyebabkan mereka memilih tidak rasional. Terhadap hal ini diketahui prasyarat lainnya dari pilihan rasional adalah adanya akses informasi terhadap kebijakan pemerintah oleh masyarakat, tanpa akses informasi ini mustahil masyarakat dapat menilai kebijakan pemerintah dikaitkan dengan manfaat pendapatan (*utilities income*).

Beberapa pendekatan untuk melihat perilaku memilih ; yaitu (a) pendekatan struktural, (b) pendekatan sosiologis, (c) pendekatan ekologis, (d) pendekatan psikologi sosial dan (e) pendekatan rasional. Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks

struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai (*Surbakti, 1992 ; 145*). Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Jika di Amerika Serikat terdapat distrik, *precinct*, dan *ward*. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

Pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi

pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Firmanzah (2012) dalam KPU Kabupaten Kaur (2015) memandang pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Pemilih menentukan keputusannya berdasarkan hal-hal yang rasional dan non rasional. Karakter tiap individu dan pandangannya juga membedakan pilihan satu orang dengan orang lain. Dalam diri masing-masing pemilih

terdapat dua orientasi sekaligus yaitu orientasi *'policy-problem-solving'* dan orientasi *'ideologi'*. *Policy-problem-solving* menyangkut kemampuan kontestan dalam menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Sementara itu ikatan ideologi menekankan aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis.

Bagan 1 :
Konfigurasi Pemilih

Tinggi	Pemilih Rasional	Pemilih Kritis
<i>Orientasi policy-problem-solving</i>	Pemilih Skeptis	Pemilih Tradisional
Rendah	Rendah	Tinggi
	Orientasi ideologi	

Sumber : Firmanzah, 2012 dalam KPU Bengkulu Utara 2015

Pemilih Rasional lebih mengutamakan kemampuan partai politik dan kontestan dalam program kerjanya. Mereka tidak terlalu memetingkan paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis. Bagi mereka, apa yang bisa akan dan telah dilakukan partai atau kontestan lebih penting daripada paham dan nilai yang dianut partai atau kontestan tersebut.

Pemilih Kritis berorientasi pada kemampuan partai dan kontestan serta nilai-nilai ideologis yang diyakininya. Pemilih jenis ini cenderung loyal, tidak mudah pindah partai. Mereka juga secara kritis menganalisis kaitan antara system nilai partai (*ideology*) dengan kebijakan yang akan dibuat. Bagi parpol dan kontestan, pemilih dari kelompok ini bisa membantu parpol meningkatkan kinerjanya.

Pemilih Tradisional lebih mementingkan orientasi ideologi dari pada kebijakan parpol atau kontestan. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Bagi mereka, figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sangat penting sebuah partai politik atau seorang kontestan. Pemilih tradisional didominasi

oleh mereka yang konservatif memegang nilai dan paham yang dianut serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Bagi parpol dan kontestan, pemilih tradisional lebih mudah dikendalikan dan dimobilisir. Sedangkan Pemilih Skeptis memiliki tidak menganggap penting orientasi *ideology* partai politik atau seorang kontestan. Mereka juga tidak memedulikan program kerja parpol dan kontestan.

Dalam menentukan pilihannya dalam pemilu, pemilih terbagi dalam tiga tahapan yaitu proses impresif, proses image domain dan proses proximity. Proses impresif menunjukkan bahwa pemilih akan memilih parpol dan kandidat yang memberikan impresi atau kesan positif, baik secara rasional maupun emosional. Untuk itu, parpol harus mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dari para saingannya. Parpol dan kandidat perlu memiliki inovasi sehingga memiliki isu politik dan cara pemecahannya serta berani menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Proses image dominan menjabarkan kecenderungan pemilih yang mementingkan image parpol dan kandidat yang selalu hadir di setiap permasalahan dan situasi. Parpol dan kontestan didorong untuk menciptakan image

domain sehingga pemilih akan mengetahui dengan yakin apakah kandidat atau partai politik bersangkutan selalu hadir di setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat (Firmansyah dalam KPU Kabupaten Bengkulu Utara, 2015).

Proses *proximity* menggarisbawahi pentingnya unsur *proximity* parpol dan kandidat dengan pemilih. *proximity* disini bisa berupa kedekatan dalam hal-hal yang bersifat rasional, ideologi, kedaerahan, emosional, sampai kedekatan pada hal-hal yang bersifat tradisional. Bagi pemilih, kedekatan ini di dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian pemilih. Parpol dan kandidat bisa memanfaatkan isu kedekatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi komunikasi politik. Intensifikasi berarti pemanfaatan dan pengoptimalan fungsi media serta isu politik yang diembuskan oleh kandidat atau partai politik. Sedangkan ekstensifikasi berarti meningkatkan wilayah penyebaran dan frekuensi media komunikasi.

Lebih jauh dalam KPU Bengkulu Utara (2015) dijelaskan bahwa karakteristik pemilih dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : (i) kelompok yang terbentuk berdasarkan kekerabatan dan keturunan, (ii) ikatan primordialisme keagamaan dan etnis dan (iii) komunitas heterogen. Pada kelompok yang berasal dari sistem kekerabatan, ketokohan merupakan hal yang penting karena pada tokoh inilah masyarakat menyadari sikap, perilaku dan orientasinya. Bagi kandidat atau calon legislatif, kelompok seperti ini susah untuk dimasuki dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh calon yang bersangkutan.

Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya didasarkan atas sistem kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis komunitas masyarakat di daerah pemilihan, daerah/wilayah atau kantong-kantong basis massa yang ditandai dengan adanya simbol-

simbol partai yang memberikan gambaran dan sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut merupakan kantong basis massa partai tertentu.

Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap *ambivalen*, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. Kondisi sosial masyarakat pada strata demikian diperlukan adanya kandidat / calon yang memiliki kapabilitas yang tinggi baik dari aspek sosiologis (memiliki kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan kelompok masyarakat dan mampu mempengaruhi sikap dan orientasi komunitas masyarakat tersebut), atau popularitas dan reputasi tinggi pada kelompok masyarakat tersebut. Jika hal tersebut mampu dilakukan oleh seorang kandidat, maka sangat terbuka perolehan suara pemilih didapat dari komunitas masyarakat tersebut (KPU Kabupaten Kaur, 2015 dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara, 2016).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah perbandingan terhadap dua hasil penelitian yaitu : hasil penelitian KPU Kabupaten Kaur tentang perilaku pemilih di masyarakat Kabupaten Kaur dalam pemilu legislatif 2014 yang dengan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang perilaku pemilih di masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dalam pemilu legislatif 2014.

Penelitian oleh KPU Kabupaten Kaur dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sendiri menggunakan metoda pengumpulan data *Focused Group Discussion (FGD)*, *Wawancara Mendalam*, dan *Telaah Dokumen*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh setempat, penyelenggara pemilu, pemilih (pemilih hak suara) dan peserta yang terlibat dalam kegiatan pemilu legislatif 2014 seperti calon legislatif. FGD diselenggarakan dengan menghadirkan masyarakat dari penyelenggara pemilu, pemilih dan caleg peserta pemilu legislatif 2014. Kegiatan ini menggunakan instrumen pedoman FGD dan yang berisi pada pokoknya tentang pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan

aspek permasalahan dalam penelitian.

Telaah dokumen ilmiah dilakukan terhadap dokumen dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian sebelumnya, artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh instansi maupun akademisi, dan bahkan bila dianggap perlu akan dicari beberapa referensi dari internet, seperti : Data perolehan suara terbanyak, Individual karakter (agama, etnis, jenis kelamin, tingkat pendidikan, diaspora), Karakter parpol, Lokasi kemenangan parpol, Bentuk-bentuk kampanye, Daftar Calon Tetap (2004-2009-2014) - daftar anggota legislatif yang terpilih.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian Prilaku Pemilih oleh KPU Kabupaten Kaur

Dari penelitian tentang prilaku pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur, diketahui bahwa informan terlibat aktif dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan tahun 2014 baik sebagai kontestan, pemilih serta penyelenggara baik di tingkat desa atau kecamatan. Tujuan dari pemilu legislatif tersebut diakui oleh mereka untuk memilih wakil rayat yang akan membawa aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu dikatakan berhasil bilamana penyelenggaranya mulai BPS, BPK, KPU PROVINSI, KPU PUSAT dari bersih sesuai dengan aturan dari KPU. Oleh karena itu pemilu baru dapat berhasil apabila seluruh jajaran penyelenggara pemilu sampai ketingkat paling bawah telah memahami tugas dan kewajibannya.

Berkaitan dengan isu transaksional atau politik uang yang terjadi menjelang hari pemungutan suara, peserta diskusi mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Adanya jual beli suara dalam pemilu bukan berarti bahwa masyarakat itu bodoh, malah sebaliknya masyarakat dianggap cerdas karena tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih dan menjadi wakil mereka.

Kebijakan KPU yang membuat surat suara pemilu legislatif yang tanpa foto diri kontestan juga dituding menjadi pemicu mengapa terjadi politik uang. Meskipun diakui oleh para informan bahwa pemilu yang jujur dan *fair* juga sulit tercapai bilamana kontestan pemilu bertarung mengandalkan kekuatan finansial.

Pemilu juga dikatakan berhasil bilamana pemilihnya tidak apatis, kemudian peserta calegnya tidak memberikan uang kepada

pemilih. Sikap apatis terjadi karena pengalaman buruk yang dirasakan masyarakat terhadap wakil rakyat yang terpilih pada pemilu lima tahun sebelumnya.

Peserta diskusi menyatakan bahwa pemilu di Kabupaten Kaur bisa dikatakan berhasil karena masih banyak anggota masyarakat yang aktif memanfaatkan hak suaranya. Keberhasilan pemilu juga dilihat dari sikap transparansi petugas KPU dalam melakukan proses pendataan pemilih hingga perhitungan suara. Sebagian informan menganggap pemilu dikatakan berhasil manakala yang terpilih menjadi wakil rakyat adalah mereka yang bisa menyambungkan hati dan aspirasi masyarakat yang telah memilihnya. Saat ini masyarakat sudah tidak memperdulikan siapa yang bertarung memperebutkan kursi legislatif.

Parpol yang ideal adalah partai yang tidak rusuh, ketua umumnya bersih. Partai yang ideal juga bebas dari campur tangan pendirinya, sehingga parpol itu tidak diidentikan dengan seseorang, terutama pendirinya. Parpol yang ideal juga dilihat dari kepemimpinannya dari pusat hingga daerah. Meskipun memiliki visi dan misi yang baik, namun karena moral pengurus parpol yang tidak baik maka penerapan visi dan misinya tidak berjalan dengan baik. Perpecahan dalam partai juga menunjukkan bahwa saat ini tidak ada partai yang bisa dikatakan ideal.

Seorang calon anggota legislatif yang layak dipilih adalah mereka yang memiliki kualifikasi tertentu, antara lain pengalaman dalam berorganisasi dan kepemimpinan. Penampilan fisik kandidat tidak dianggap sebagai hal yang utama, meskipun dari penampakan itulah pertama kali pemilih akan mencari tahu mengenai latar belakang calon anggota legislatif. Kemampuan finansial dianggap penting karena merupakan modal untuk mengikuti pemilu, terutama untuk diberikan kepada pemilih. Caleg yang dianggap amanah tidak otomatis akan terpilih, karena faktor modal material yang dimiliki lebih menjamin keberhasilan mereka dalam pemilu. Terdapat informan yang menyatakan pemilu 2014 dapat dinilai lebih buruk dari pemilu 2009 bila ditilik dari fenomena jual beli suara.

Faktor kekerabatan juga merupakan alasan penting mengapa seseorang memilih caleg dari partai dan nomor urut tertentu. Bila kerabat dekat mencalon, maka suara akan diberikan kepada mereka. Meskipun agama yang sama juga menjadi faktor penting,

namun latar belakang dari suku apa caleg berasal tidak menjadi permasalahan.

Karena KPU hanya memberikan informasi mengenai kontestan pemilu, maka selanjutnya parpol dan caleg sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan caleg umumnya berupa kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) dan mendatangi acara masyarakat (pernikahan). Dalam kunjungan langsung kerumah-rumah, tidak semua caleg dan atau tim suksesnya memaparkan program dan dan misinya bila suatu saat duduk di parlemen. Masyarakat yang mendatangi pun tidak mengkritisi program-program yang dijanjikan calon, meskipun ada kesempatan untuk menanyakan hal tersebut. Peserta umumnya hanya menanyakan asal usul kandidat, seperti anak dan keturunan siapa. Umumnya caleg atau tim sukses yang diutus membawa kartu nama dan amplop berisi uang yang akan diberikan kepada warga yang mendatangi. Bila satu rumah didatangi lima caleg maka berarti mereka akan mendapatkan lima amplop. Jumlah amplop terkadang juga disesuaikan dengan berapa suara yang bisa disumbangkan dalam pemilu. Bila amplop diberikan oleh lebih dari satu calon, maka mereka akan menerima semuanya. Namun demikian caleg mana yang akan dipilih tergantung pada hati nurani, dan bukan siapa caleg yang memberikan uang paling banyak.

Orang terdekat dengan pemilih memiliki andil yang besar dalam menentukan siapa caleg yang akan dipilih di hari pemungutan suara. Pemberi uang terbanyak juga tidak terjamin akan mendapatkan suara banyak dalam penghitungan suara.

Diakui bahwa KPU telah melaksanakan bernagai sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi tersebut ditujukan ke sekolah-sekolah, pemilih perempuan, pemilih pemula, disabilitas(kebutuhan khusus), tokoh agama, orang pinggiran, agen yang kita bentuk itu melaporkan perbulan, melaporkan agenda yang mereka lakukan disetiap desa ataupun kecamatan yang mereka bimbing.

Analisa dari penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur menunjukkan temuan bahwa pemilik hak suara voter tidak serta merta mendukung caleg memberi dengan jumlah nominal paling banyak karena menurut mereka pilihan tetap berdasarkan hati nurani, bukan jumlah uang yang telah diberikan. Hal ini terjadi karena pemberian tersebut dianggap sebagai kebodohan dari caleg dan tim suksesnya. Fenomena ini

secara teoritis bersesuaian dengan pendapat Fadillah Putra (2003) yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Kekecewaan pemilih pada anggota legislatif yang tidak melaksanakan janji membuat pemilih menjadi apatis, enggan berpartisipasi dengan cara yang benar dan memanfaatkan peluang untuk memanfaatkan caleg untuk mendapatkan keuntungan secara cepat.

Pernyataan Dan Nimmo yang dikutip oleh Harry Susanto yang menyatakan bahwa pada hakekatnya perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor citra partai politik, citra kandidat dan isu politik tidak sepenuhnya terbukti dalam penelitian di Kabupaten Kaur. Di satu sisi, pengalaman kurang menyenangkan memang membuat voter enggak memberikan suaranya untuk anggota dewan yang mencalon kembali; namun di sisi lain citra parpol dan isu politik ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pengambilan keputusan.

Perilaku pemilih yang menerima amplop dari caleg bisa disejajarkan dengan *self-interest axiom* yang dideskripsikan oleh Anthony Down. Menurut Down, manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan materiail mereka, yakni pemasukan atau harga benda mereka. Dalam hal ini, pemilih akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Namun demikian penyebab dari *self-interest axiom* tersebut bukanlah dari ketidaktahuan pemilih terhadap parpolnya; justru karena pemahaman tentang keadaan parpol itu lah, masyarakat bertindak demikian.

Pola jual beli suara yang dilakukan voter secara parsial selaras dengan Surbakti yang menyebutkan ada alasan rasional yang membuat voter melakukan pilihan. Memang menurut pendekatan ini kegiatan memilih adalah produk kalkulasi untung dan rugi, namun sebenarnya voter hanya mencari keuntungan sesaat saja, dan tidak mempertimbangkan apakah caleg yang terpilih memberi pengaruh positif secara langsung maupun tidak langsung pada dirinya di kemudian hari. Bila dikonsultasikan dengan tipologi pemilih menurut Firmanzah (2012) dalam KPU Kabupaten Kaur (2015), maka pemilih di Kabupaten Kaur termasuk dalam kategori pemilih skeptis.

Dari proses penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur (2015) ini

namun latar belakang dari suku apa caleg berasal tidak menjadi permasalahan.

Karena KPU hanya memberikan informasi mengenai kontestan pemilu, maka selanjutnya parpol dan caleg sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan caleg umumnya berupa kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) dan mendatangi acara masyarakat (pernikahan). Dalam kunjungan langsung kerumah-rumah, tidak semua caleg dan atau tim suksesnya memaparkan program dan dan misinya bila suatu saat duduk di parlemen. Masyarakat yang didatangi pun tidak mengkritisi program-program yang dijanjikan calon, meskipun ada kesempatan untuk menanyakan hal tersebut. Peserta umumnya hanya menanyakan asal usul kandidat, seperti anak dan keturunan siapa. Umumnya caleg atau tim sukses yang diutus membawa kartu nama dan amplop berisi uang yang akan diberikan kepada warga yang didatangi. Bila satu rumah didatangi lima caleg maka berarti mereka akan mendapatkan lima amplop. Jumlah amplop terkadang juga disesuaikan dengan berapa suara yang bisa disumbangkan dalam pemilu. Bila amplop diberikan oleh lebih dari satu calon, maka mereka akan menerima semuanya. Namun demikian caleg mana yang akan dipilih tergantung pada hati nurani, dan bukan siapa caleg yang memberikan uang paling banyak.

Orang terdekat dengan pemilih memiliki andil yang besar dalam menentukan siapa caleg yang akan dipilih di hari pemungutan suara. Pemberi uang terbanyak juga tidak terjamin akan mendapatkan suara banyak dalam penghitungan suara.

Diakui bahwa KPU telah melaksanakan bernagai sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi tersebut ditujukan ke sekolah-sekolah, pemilih perempuan, pemilih pemula, disabilitas(kebutuhan khusus) , tokoh agama, orang pinggiran, agen yang kita bentuk itu melaporkan perbulan, melaporkan agenda yang mereka lakukan disetiap desa ataupun kecamatan yang mereka bimbing.

Analisa dari penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur menunjukkan temuan bahwa pemilik hak suara voter tidak serta merta mendukung caleg memberi dengan jumlah nominal paling banyak karena menurut mereka pilihan tetap berdasarkan hati nurani, bukan jumlah uang yang telah diberikan. Hal ini terjadi karena pemberian tersebut dianggap sebagai kebohohan dari caleg dan tim suksesnya. Fenomena ini

secara teoritis bersesuaian dengan pendapat Fadillah Putra (2003) yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Kekecewaan pemilih pada anggota legislatif yang tidak melaksanakan janji membuat pemilih menjadi apatis, enggan berpartisipasi dengan cara yang benar dan memanfaatkan peluang untuk memanfaatkan caleg untuk mendapatkan keuntungan secara cepat.

Pernyataan Dan Nimmo yang dikutip oleh Harry Susanto yang menyatakan bahwa pada hakekatnya perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor citra partai politik, citra kandidat dan isu politik tidak sepenuhnya terbukti dalam penelitian di Kabupaten Kaur. Di satu sisi, pengalaman kurang menyenangkan memang membuat voter enggak memberikan suaranya untuk anggota dewan yang mencalon kembali; namun di sisi lain citra parpol dan isu politik ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pengambilan keputusan.

Perilaku pemilih yang menerima amplop dari caleg bisa disejajarkan dengan *self-interest axiom* yang didiskripsikan oleh Anthony Down. Menurut Down, manusia bertindak egois, terutama oleh karena mereka ingin mengoptimalkan kesejahteraan material mereka, yakni pemasukan atau harga benda mereka. Dalam hal ini, pemilih akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Namun demikian penyebab dari *self-interest axiom* tersebut bukanlah dari ketidaktahuan pemilih terhadap parpolnya; justru karena pemahaman tentang keadaan parpol itu lah, masyarakat bertindak demikian.

Pola jual beli suara yang dilakukan voter secara parsial selaras dengan Surbakti yang menyebutkan ada alasan rasional yang membuat voter melakukan pilihan. Memang menurut pendekatan ini kegiatan memilih adalah produk kalkulasi untung dan rugi, namun sebenarnya voter hanya mencari keuntungan sesaat saja, dan tidak mempertimbangkan apakah caleg yang terpilih memberi pengaruh positif secara langsung maupun tidak langsung pada dirinya di kemudian hari. Bila dikonsultasikan dengan tipologi pemilih menurut Firmanzah (2012) dalam KPU Kabupaten Kaur (2015), maka pemilih di Kabupaten Kaur termasuk dalam kategori pemilih skeptis.

Dari proses penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur (2015) ini

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peserta FGD memiliki telah pengetahuan yang cukup memadai mengenai (a) konsep pemilu sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang untuk memfasilitasi peralihan kekuasaan; (b) tujuan pemilu legislatif sebagai sarana memilih wakil untuk daerah yang pada akhirnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang diwakili; (c) Pemilu ideal yang memiliki ciri-ciri prosesnya berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dan sinergi yang baik antara peserta, penyelenggara dan pemilih.
- b. Partisipan FGD mampu memaparkan konsep mengenai parpol dan wakil rakyat yang dianggap ideal. Namun begitu mereka, terutama kelompok pemilih dan penyelenggara pemilu masih melihat sebagian besar partai dan wakil rakyat masih jauh dari kondisi ideal.
- c. Pemahaman peserta diskusi mengenai konsep keterwakilan juga cukup memadai. Sebagian besar peserta mengetahui fungsi representatif dalam legislatif dan siapa yang sebaiknya dipilih sebagai wakil mereka.
- d. Pemilih di kabupaten kaur masuk dalam kategori pemilih skpetis. Pemilih tipe ini lebih tertarik pada uang yang ditawarkan oleh caleg dan tidak menganggap penting orientasi ideology partai politik atau seorang kontestan. Pengalaman kurang menyenangkan pada pemilu-pemilu sebelumnya membuat voter enggak memberikan suaranya untuk anggota dewan yang mencalon kembali. Voter hanya mencari keuntungan sesaat saja, dan tidak mempertimbangkan apakah caleg yang terpilih memberi pengaruh positif secara langsung maupun tidak langsung pada dirinya di kemudian hari.
- e. Fakta bahwa masyarakat tahu fungsi dan tujuan pemilu, namun menggunakan haknya dengan cara yang tidak benar menunjukkan ada yang salah dengan pemahaman masyarakat atas proses demokrasi. Oleh karenanya masyarakat perlu disadarkan kembali mengenai melalui program pendidikan politik yang semestinya dilakukan oleh parpol.

2. Hasil Penelitian Perilaku Pemilih oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Dari proses FGD yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Utara diketahui bahwa makna pemilu legislatif bagi peserta diskusi adalah sarana mencari pemimpin dan wakil rakyat yang akan aspirasi masyarakat. Seluruh peserta diskusi baik penyelenggara, peserta maupun pemilih menginginkan pemilu berjalan dengan baik. Adapun pemilu dikatakan berhasil manakala pelaksanaannya berjalan dengan tertib, jujur dan adil, damai, transparan dan tidak ada kecurangan. Pemilu dikatakan berhasil bilamana hampir semua masyarakat yang telah terdaftar bisa memanfaatkan hak suaranya. Keberhasilan pemilu juga berkaitan dengan penyelenggara pemilu, dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu. Pemilu juga dipandang sebagai sarana mencerdaskan masyarakat, artinya terutama pemilih pemula untuk mengetahui manfaat pemilu untuk menjangkau tujuan negara. Bagi pemuka agama pemilu juga dimaknai sebagai pelaksanaan kewajiban umat beragama. Keberhasilan pemilu juga dilihat dari kestabilan situasi sosial pasca pelaksanaan pemilu. Dari semua indikator keberhasilan pemilu, peserta diskusi di Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan bahwa pada prinsipnya pemilu yang baik tidak susah untuk dicapai.

Calon legislatif yang baik bisa dilihat dari rekam jejaknya yang bersih dari tindak kriminal. Peserta pemilu tidak melihat tingkat pendidikan caleg, selama mereka tidak menggunakan ijazah palsu. Selain memilih berdasarkan individu yang maju dalam pemilu legislatif, partai politik asal caleg juga menjadi perhatian peserta diskusi. Agama yang dianut caleg masih dianggap penting, namun tidak demikian dengan etnis. Berkaitan dengan pemilu yang ideal informan menjawab bahwa pada dasarnya semua parpol memiliki visi misi yang ideal. Partai ideal juga dilihat dari lamanya parpol tersebut berkiprah dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kondisi internal partai juga menjadi pertimbangan ketika membahas ideal tidaknya sebuah parpol; apakah pemimpinnya terlibat dalam skandal, apakah sering terjadi kistruh internal. Peserta FGD melihat bahwa meskipun memiliki visi dan misi yang bisa dikatakan ideal, namun pada pelaksanaannya, parpol yang bertarung dalam pemilu legislatif saat ini belum bisa dikatakan ideal. Sementara itu, caleg yang dipilih oleh pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014

lalu adalah mereka yang dianggap memiliki komitmen, yang memiliki modal untuk mencaleg, berjiwa sosial, memiliki pengalaman berorganisasi, cerdas, disiplin.

Berkaitan dengan praktik transaksional, para informan yang pernah ikut bertarung dalam pemilu caleg 2014 memandang sebagai sesuatu yang wajar karena masyarakat juga menginginkannya. Popularitas seseorang di daerah pemilihan tidak berarti tanpa adanya pemberian uang

Dan bila sudah terpilih sebagai anggota dewan, tradisi berbagi rejeki seperti ini juga akan dilanjutkan agar dapat terpilih kembali pada pemilu berikutnya.

Masyarakat akan mengumpulkan informasi mengenai calon-calon yang akan bertarung dalam pilegmelalui berbagai sumber, seperti dari KPU, organisasi yang diikuti, leaflet, pamflet, iklan-iklan caleg, baliho, media massa, media sosial, keluarga, masyarakat sekitar pemilih, parpol dan dari caleg sendiri. Caleg juga dibantu oleh parpol pengusungnya untuk melaksanakan sosialisasi meskipun tidak semua parpol melakukannya.

Pada saat melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, caleg akan menyampaikan program-programnya. Sosialisasi ini juga tidak berhasil bila tidak memberikan amplop pada sasaran sosialisasi. Praktek pemberian amplop berlaku pada semua lapisan masyarakat baik yang sudah mapan secara ekonomi maupun belum, baik yang berpendidikan maupun tidak. Bahkan pemilih yang berasal dari kalangan terdidik juga turut menyuburkan bahkan memperparah praktek ini.

Dalam memutuskan caleg mana yang akan dipilih di hari pemungutan suara, biasanya masyarakat menanyakan atau mendiskusikan ini dengan orang tua, rekan kerja, organisasi dimana mereka bekerja termasuk atasan di tempat bekerja. Sebagian peserta FGD juga mengakui bahwa menentukan pilihan karena amplop yang ditawarkan oleh caleg dan tim suksesnya, meskipun terdapat pula peserta yang mengaku memilih berdasarkan hati nurani setelah melihat iklan sang caleg. Organisasi kemasyarakatan juga ikut berperan untuk mengarahkan siapa yang bisa dipilihmelalui kriteria calon yang layak untuk dipilih, namun masih memberi kebebasan memilih yang dirasa sesuai oleh individu anggota.

Secara teoritis dapat diidentifikasi bahwa meskipun perilaku memilih peserta FGD di Kabupaten Bengkulu Utara sangat

dipengaruhi oleh faktor sosiologis, namun ternyata ego mereka lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat Anthony Downs yang menyatakan pemilih lebih mendahulukan kepentingannya sendiri (*self-interest axiom*) secara tidak langsung terbukti dalam penelitian ini. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep politis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintah dibandingkan dengan partai lain. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan parpol dan kandidat menyebabkan mereka mencari kemudahan dengan menerima amplop pada masa kampanye dan tidak memperhitungkan kerugian yang bisa dialami pasca pemilihan.

Dari seluruh rangkaian penelitian tentang perilaku pemilih di yang dilakukannya, KPU Kabupaten Bengkulu Utara menyimpulkan bahwa :

- a. Peserta FGD telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai (a) konsep pemilu sebagai pelaksanaan amanat undang-undang untuk memfasilitasi peralihan kekuasaan; (b) tujuan pemilu legislatif sebagai sarana memilih wakil untuk daerah yang pada akhirnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang diwakili; (c) Pemilu ideal yang memiliki ciri-ciri prosesnya berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dan sinergi yang baik antara peserta, penyelenggara dan pemilih.
- b. Informan yang mengikuti FGD secara umum mampu memaparkan konsep tentang partai politik dan konsep tentang wakil rakyat yang dianggap ideal. Dan mereka pun - terutama kelompok pemilih dan penyelenggara pemilu - dapat menilai masih bahwa sebagian besar partai dan wakil rakyat masih jauh dari kondisi ideal.
- c. Pemahaman peserta diskusi mengenai konsep keterwakilan juga cukup memadai. Sebagian besar peserta mengetahui fungsi representatif dalam legislatif dan siapa yang sebaiknya dipilih sebagai wakil mereka.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaur dan hasil penelitian dan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Bengkulu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum masyarakat di kedua wilayah kabupaten dimaksud secara khusus dan masyarakat di Provinsi Bengkulu secara umum dapat dipandang telah memiliki pengetahuan yang memadai berkaitan dengan konsep pemilihan umum dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, tujuan dari pemilihan umum legislative, dan konsep mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal.
2. Tokoh masyarakat secara umum di wilayah Kabupaten Kaur dan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengetahuan yang relative sama berkaitan dengan konsep dan peranan partai politik dan wakil rakyat yang ideal; dan memiliki pandangan bahwa keadaan partai politik serta wakil rakyat yang ada saat ini belum memenuhi kriteria ideal tersebut. Kenyataan ini mungkin dapat menggambarkan kondisi yang lebih umum di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu.
3. Masyarakat secara umum di kedua wilayah Kabupaten tersebut dapat dipandang telah memahami tentang konsep keterwakilan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.
4. Secara umum dapat dinilai bahwa masyarakat dan pelaku politik di Kabupaten Bengkulu Utara dan di Kabupaten Kaur sama-sama menganggap praktik transaksional sebagai suatu kewajiban, meskipun mereka menyadari bahwa hal itu bukanlah hal yang baik untuk pelaksanaan demokrasi. Meskipun demikian, hasil penelitian oleh Kabupaten Kaur menunjukkan pengakuan yang lebih vulgar dibandingkan di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Secara umum teori-teori yang berkaitan dengan perilaku pemilih terbukti berlaku di masing-masing lokasi penelitian meskipun terdapat beberapa anomali yang bersifat spesifik.

F. Rekomendasi

1. Diperlukan telaah dan aksi sosiologis yang lebih jauh untuk mendorong agar pelaksanaan pemilihan umum dan peranan institusi politik berada pada

konstruksi yang semestinya. Sangat mungkin diperlukan penyesuaian regulasi sebagai piranti lunak *social engineering* di masyarakat.

2. Peran penyelenggara pemilu perlu diperluas untuk melakukan pembangunan *social awareness* yang berkelanjutan di masyarakat.
3. Partai Politik diharapkan perlu mulai mengefektifkan fungsinya melakukan pendidikan politik di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriarn. 2002. *Partisipasi dan Partai Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, edisi revisi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- _____. 2011. *Mengelola Partai Politik – Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, ed.2*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Susanto, E. H. 2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah : Tinjauan terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Laporan Penelitian

KPU Kabupaten Bengkulu Utara; 2015, Laporan Penelitian : Perilaku Pemilih (*Voters Behavior*) pada Pemilu Legislatif 2014 Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Argamakmur

KPU Kabupaten Kaur; 2015, Laporan Penelitian : Perilaku Pemilih (*Voters Behavior*) pada Pemilu Legislatif 2014 Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Kaur, Bintuhan